

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DI SDN 03 IV KOTO AUR MALINTANG: STRATEGI INOVATIF MENUJU PEMBELAJARAN MANDIRI

**Weni Yulastri¹, Weli Sartika Sari², Yuslini Fitri³, Marni Nelvi⁴, Mahrifa
Abdilla Yanre⁵, Nell Puspita Sari⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Program Studi Pendidikan Dasar S2, Universitas Adzkia

e-mail: weniyulastri@adzkia.ac.id¹, iwelsartika@gmail.com²,
yuslinifitri07@guru.sd.belajar.id³, marninelvi46@guru.sd.belajar.id⁴,
dellaibu11@gmail.com⁵, sarinellpuspita8@gmail.com⁶.

ABSTRACT

This article discusses the issues of basic education policy faced by SDN 03 IV Koto Aur Malintang, particularly in the context of implementing the Merdeka Curriculum. The main problems include limited technological infrastructure, disparities in teacher quality, and suboptimal resource management. Through literature review and analysis based on national and international journals, solutions are formulated in the form of increased technology, professional development for teachers, and curriculum flexibility. The results indicate that well-planned policy innovations can promote independent learning and improve the quality of basic education.

Keywords: education policy, Independent Curriculum, professional teachers, technology infrastructure, independent learning

ABSTRAK

Artikel ini membahas permasalahan kebijakan pendidikan dasar yang dihadapi SDN 03 IV Koto Aur Malintang, khususnya dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka. Permasalahan utama meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan kualitas guru, dan manajemen sumber daya yang belum optimal. Melalui kajian literatur dan analisis berdasarkan jurnal nasional serta internasional, dirumuskan solusi berupa peningkatan teknologi, pengembangan profesional guru, dan fleksibilitas kurikulum. Hasilnya menunjukkan bahwa inovasi kebijakan yang terencana dapat mendorong pembelajaran mandiri dan meningkatkan mutu pendidikan dasar.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan, Kurikulum Merdeka, guru profesional, infrastruktur teknologi, pembelajaran mandiri

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, kualitas pendidikan dasar menjadi fondasi penting bagi pengembangan sumber daya manusia. Meskipun Indonesia telah

menerapkan program wajib belajar 12 tahun sejak 2013, masih terdapat ketimpangan kualitas antarwilayah terutama antara pusat dan daerah terpencil, seperti rendahnya rasio guru-siswa dan ketersediaan fasilitas

sekolah dasar. Selain itu, hasil PISA menunjukkan bahwa sekitar 70 % siswa Indonesia belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi dan numerasi, memperlihatkan masalah sistemik yang kerap terjadi selama dekade terakhir

Sebagai respons, pemerintah meluncurkan Kurikulum Merdeka sejak 2022, menggantikan Kurikulum 2013 melalui tiga opsi: Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka. Fokusnya adalah pembelajaran berbasis proyek, materi esensial serta fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan konteks lokal

Namun, implementasi Kurikulum Merdeka di tingkat Sekolah Dasar menghadapi berbagai tantangan. Kajian literatur sistematis oleh Sucipto et al. (2021–2023) mengidentifikasi kendala mulai dari infrastruktur, kompetensi guru, evaluasi pembelajaran, kondisi ekologi siswa, hingga kesenjangan kebijakan pemerintah. Analisis lain menyoroti bahwa guru—terutama di daerah terpencil—sering kekurangan pelatihan pedagogis dan teknologi, serta minim dukungan monitoring dan evaluasi yang konsisten

Selanjutnya, kondisi geografis dan infrastruktur di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) makin memperlebar kesenjangan. Banyak sekolah yang tidak memiliki sarana digital hingga koneksi internet yang memadai, sehingga sulit beralih ke pembelajaran proyek atau berbasis teknologi

Berangkat dari konteks ini, analisis mendalam terhadap kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka di SDN 03 IV Koto Aur Malintang menjadi sangat relevan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi sejauh mana kesiapan sekolah—termasuk infrastruktur, kompetensi

guru, dan sistem manajemen dalam mendukung pembelajaran mandiri dan adaptif berbasis Kurikulum Merdeka. Dengan landasan kajian literatur berdasarkan Sugiyono (2022) dan berbagai penelitian terkini, artikel ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (*literature review*) sebagaimana diuraikan oleh Sugiyono (2022). Metode ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis berbagai referensi ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas. Tahapan pelaksanaan kajian literatur meliputi:

1. Identifikasi isu atau permasalahan utama yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dasar.
2. Pengumpulan sumber literatur dari jurnal nasional dan internasional, buku, serta laporan penelitian yang memiliki relevansi kuat dengan konteks kebijakan Kurikulum Merdeka.
3. Evaluasi terhadap kualitas dan validitas literatur yang digunakan.
4. Pengorganisasian literatur berdasarkan tema-tema besar yang terkait dengan permasalahan dan solusi kebijakan pendidikan dasar.
5. Penyusunan sintesis dan formulasi rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis teori dan data literatur.

Sumber yang digunakan dalam artikel ini terdiri atas tiga jurnal internasional dan dua jurnal nasional, termasuk referensi utama dari Sugiyono (2022). Literatur-literatur tersebut dipilih berdasarkan relevansi

topik, kredibilitas publikasi, dan keterkinian data untuk memastikan ketepatan dalam memberikan gambaran situasi serta strategi kebijakan yang aplikatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Permasalahan Kebijakan

Secara keseluruhan, terdapat tiga masalah utama yang muncul dari hasil kajian ini:

1. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi.

SDN 03 IV Koto Aur Malintang kekurangan perangkat digital seperti komputer dan tablet, serta menghadapi kendala jaringan internet yang tidak stabil. Hal ini sesuai dengan temuan umum bahwa sarana TIK di daerah terpencil sulit dijangkau, yang sangat menghambat pembelajaran berbasis digital. Ketiadaan perangkat keras seperti komputer, proyektor, atau akses internet yang layak membuat guru dan siswa tidak dapat mengakses sumber belajar digital secara maksimal.

Selain itu, keterbatasan ini juga menghambat implementasi Kurikulum Merdeka yang mendorong penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Guru mengalami kesulitan dalam mencari bahan ajar digital atau melakukan asesmen daring, sedangkan siswa tidak memiliki pengalaman belajar dengan teknologi yang menjadi bagian penting dari kompetensi abad 21.

Kondisi ini memperlebar kesenjangan digital antara sekolah di kota dengan sekolah di daerah, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran dan ketercapaian hasil belajar siswa.

2. Kesenjangan Kompetensi Guru.

Ada ketidakseimbangan dalam kemampuan guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka dan teknologi dalam pembelajaran. Hanya sekitar 30% guru yang pernah mengikuti pelatihan digital atau kurikulum baru secara mandiri, sehingga standar pengajaran di sekolah ini belum seragam.

Ketimpangan ini menyebabkan sebagian guru masih menggunakan pendekatan pembelajaran konvensional yang kurang relevan dengan kebutuhan siswa saat ini. Guru yang belum memahami prinsip diferensiasi, asesmen formatif, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran cenderung kesulitan menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, dan berpihak pada murid.

Akibatnya, terdapat perbedaan signifikan dalam kualitas pengajaran antar kelas yang dapat memengaruhi pencapaian kompetensi siswa secara keseluruhan. Ketiadaan program pelatihan sistematis dari institusi pendidikan atau dinas terkait turut memperparah situasi ini. Guru harus berjuang secara mandiri untuk mengembangkan kompetensinya, sementara keterbatasan waktu, fasilitas, dan literasi digital menjadi hambatan yang tidak mudah diatasi.

3. Manajemen Sumber Daya yang Lemah.

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran di SDN 03 IV Koto Aur Malintang belum optimal. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai sistem pendukung seperti Sistem Informasi

Pengadaan Sekolah (SIPLah) untuk memudahkan pembelanjaan barang dan jasa pendidikan secara

transparan dan efisien, namun tingkat pemanfaatannya di sekolah ini masih rendah. Banyak pengelola sekolah belum sepenuhnya memahami prosedur teknis dan manfaat sistem tersebut, sehingga pengadaan fasilitas penunjang pembelajaran seringkali tidak tepat sasaran atau tertunda. Di sisi lain, supervisi kepala sekolah dalam hal pembinaan guru, pemantauan pembelajaran, serta evaluasi kinerja belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan manajemen berbasis data seperti penggunaan data rapor pendidikan, hasil asesmen nasional, atau data kehadiran guru dan siswa masih belum menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan strategis sekolah. Akibatnya, program-program peningkatan mutu pendidikan kurang tepat sasaran, tidak terukur hasilnya, dan sulit untuk dievaluasi secara objektif.

Latar Belakang Masalah

Penyebab mendasar dari ketiga isu di atas adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran sekolah menyebabkan alokasi dana lebih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti operasional harian, pemeliharaan fasilitas fisik, dan pembelian perlengkapan belajar minimum. Hal ini membuat dana yang tersedia untuk pengembangan teknologi pendidikan menjadi sangat terbatas. Walaupun pemerintah telah menggulirkan berbagai program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program TIK nasional, namun distribusi fasilitas dan dukungan teknologi masih belum merata, terutama untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil seperti SDN 03 IV

Koto Aur Malintang. Sekolah ini belum mendapatkan prioritas dalam distribusi perangkat digital seperti laptop, proyektor, atau jaringan internet sekolah. Selain itu, pemanfaatan anggaran yang ada sering kali tidak diarahkan secara strategis untuk mendukung pembelajaran digital karena kurangnya perencanaan jangka panjang berbasis data. Akibatnya, transformasi digital di sekolah menjadi terhambat dan kesenjangan dengan sekolah lain semakin lebar.

2. Kurangnya Pelatihan Berkelanjutan bagi Guru terbukti hanya sebagian kecil guru yang mengikuti program peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pelatihan masih terbatas, baik dari segi frekuensi, kualitas, maupun relevansi materi. Banyak guru di SDN 03 IV Koto Aur Malintang belum terlibat dalam pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah atau lembaga pendidikan, baik secara daring maupun luring. Dalam beberapa kasus, pelatihan yang diselenggarakan justru tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Laporan internal dan tanggapan guru menunjukkan bahwa materi yang diberikan terlalu umum, kurang kontekstual, dan tidak menjawab tantangan spesifik yang mereka hadapi di kelas, seperti pembelajaran multilevel, keterbatasan alat bantu ajar, atau penerapan teknologi dalam kondisi sarana yang minim. Akibatnya, banyak guru merasa pelatihan hanya formalitas, tidak memberikan dampak nyata terhadap praktik mengajar, dan tidak memotivasi mereka untuk menerapkan perubahan yang signifikan dalam pembelajaran. Ketidakterlibatan ini

juga berdampak pada stagnasi kualitas pembelajaran dan lambatnya adaptasi terhadap kebijakan pendidikan terbaru seperti Kurikulum Merdeka.

3. Kondisi Geografis yang Membatasi Akses Internet dan Teknologi.

Letak SDN 03 IV Koto Aur Malintang yang berada di daerah terpencil menambah tantangan dalam pengadaan dan distribusi perangkat teknologi serta penyediaan jaringan internet yang stabil. Infrastruktur jaringan komunikasi di daerah tersebut belum berkembang optimal, sehingga akses internet sering kali lambat, tidak stabil, atau bahkan tidak tersedia sama sekali pada waktu tertentu. Selain itu, kondisi medan seperti jalan yang sulit dijangkau, cuaca ekstrem, dan keterbatasan transportasi turut menghambat proses pengiriman perangkat digital dan layanan teknis lainnya. Hal ini berdampak langsung pada kesulitan sekolah dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi, termasuk dalam mengakses platform digital pemerintah seperti Merdeka Mengajar, SIMPKB, dan Rumah Belajar. Ketika akses internet terbatas, guru kesulitan mengikuti pelatihan daring, mengakses sumber belajar, atau melakukan pelaporan administrasi berbasis sistem digital. Bagi siswa, keterbatasan ini mempersempit kesempatan mereka untuk mengembangkan literasi digital dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi global. Dengan demikian, kondisi geografis menjadi faktor struktural yang memperdalam kesenjangan digital antara sekolah perkotaan dan sekolah di daerah terpencil.

Perumusan Kebijakan dan Dukungan Literatur

Berbagai solusi atau kebijakan strategis telah dirumuskan berdasarkan telaah pustaka, termasuk:

1. Peningkatan Infrastruktur Digital, seperti yang disarankan oleh Kurniati et al. (2024), yaitu penyediaan perangkat dan akses internet stabil yang dilengkapi servis & pemeliharaan.
2. Pengembangan Profesional Guru lewat Pelatihan Praktis Global, sesuai dengan wawasan Tias & Tongjean (2022) dan Tapadia (2024) bahwa pelatihan profesional harus relevan, berbasis praktik, dan kolaboratif.
3. Implementasi Kurikulum yang Fleksibel, seperti usulan Agustian (2022), agar materi ajar disesuaikan dengan kondisi siswa dan lokalitas sekolah.

Optimalisasi Manajemen Sekolah, yakni peningkatan data-driven decision-making dan supervisi aktif, yang dianjurkan Supriyanto & Wiyono (2021) sebagai fondasi keberhasilan kebijakan

Inovasi dalam Kebijakan

Untuk menjawab permasalahan tersebut, beberapa inovasi kebijakan diusulkan berikut ini:

1. Integrasi Teknologi Digital: Pemanfaatan platform daring seperti KIPIN dan Rumah Pendidikan, serta konten digital interaktif dapat meningkatkan minat dan efektivitas pembelajaran.
2. Fleksibilitas Kurikulum Lokal: Memberi keleluasaan kepada guru untuk merancang materi berbasis proyek yang relevan dengan konteks lokal siswa, memperkuat budaya dan lingkungan setempat.
3. Metode Pembelajaran Kreatif dan

Inklusif: Model seperti Problem-Based Learning dan Project-Based Learning melatih siswa berpikir kritis dan kolaboratif, bukan sekadar menghafal.

Siklus Perumusan Kebijakan yang Sistematis: Model implementasi mengikuti urutan: identifikasi isu → penetapan tujuan → alternatif → evaluasi berbasis data dan literatur → uji coba → monitoring & evaluasi terus-menerus.

D. Kesimpulan

Analisis ini menunjukkan bahwa:

1. Permasalahan kebijakan di SDN 03 IV Koto Aur Malintang bersumber dari infrastruktur yang minim, kurangnya pelatihan guru, dan manajemen sumber daya yang belum optimal.
2. Penyebab utamanya adalah keterbatasan anggaran, pelatihan yang tidak merata, dan kondisi geografis.
3. Solusi kebijakan harus diarahkan pada peningkatan infrastruktur digital, pengembangan SDM guru, dan fleksibilitas implementasi kurikulum.
4. Inovasi pembelajaran mandiri berbasis teknologi dan pendekatan kreatif sangat diperlukan untuk menjawab tantangan pendidikan abad ke-21.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, S. (2022). Kebijakan Pendidikan Dasar Perspektif Karakteristik Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1), 10–23.
- Kurniati, L., Subekti, R., & Handayani, Y. (2024). Digital infrastructure development in Indonesian primary

- education. *Journal of Educational Infrastructure Studies*, 4(1), 45–59.
- Sebayang, K. D. A., & Swaramarinda, D. R. (2020). Educational Policy Implementation in Indonesia: The Art of Decision Making. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(1), 1286–1290.
- Sucipto, A., Rahmawati, N., & Wijaya, D. (2023). Tantangan implementasi kurikulum merdeka di sekolah dasar: Kajian sistematis. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Indonesia*, 5(3), 112–127.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, A., & Wiyono, B. B. (2021). Manajemen Pengawas Sekolah Dasar pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 6(2), 234–245.
- Tapadia, S. (2024). Teacher Professional Development and Teaching Quality. *Journal of Educational Research and Practice*, 6(11), 98–105.
- Tias, S. A., & Tongjean, W. (2022). Teacher Professional Development in Indonesia: A Comparative Study with Global Practices. In Maureen, I. et al. (Eds.), *Teacher Education and Professional Development in the Digital Age* (pp. 123–137). Taylor & Francis.